

Pengaruh Peran UMKM dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Lokot Muda Harahap¹, Dina Aulia², Indah Permatasari Tambunan³,
Kharisma Nurbani⁴, Marsela Natalie Hutapea⁵

¹⁻⁵Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

E-mail: lokotmuda14@gmail.com¹, auliadina2305@gmail.com²,
indahprmsrt@gmail.com³, kharismanurbani.unimed@gmail.com⁴, marselantalie@gmail.com⁵

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Penelitian ini membahas bagaimana UMKM dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, rendahnya keterampilan manajerial, serta keterbatasan akses ke pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, seperti peningkatan akses permodalan, pelatihan bisnis dan pemasaran digital, serta percepatan digitalisasi agar UMKM lebih berdaya saing. Selain itu, dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, UMKM dapat berkontribusi lebih efektif dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Kata Kunci: UMKM, kemiskinan, pengangguran, digitalisasi, pemberdayaan ekonomi.

PENDAHULUAN

Pengangguran adalah suatu permasalahan klasik bagi bangsa Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya. Tingkat pengangguran dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurang tersedianya lapangan pekerjaan dan kurang kreatifnya masyarakat dalam menciptakan pekerjaan. Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) secara tidak langsung memberikan ruang dan wadah bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan yang secara tidak langsung mengurangi jumlah pengangguran. Kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk bertahan dengan sumber daya pribadi inilah membuat banyak kalangan merasa optimis bahwa usaha mikro, kecil menengah (UMKM) dimasa sekarang dan dimasa depan merupakan tonggak penyelamat ekonomi nasional. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai penyelamat bagi perekonomian karena merekalah yang masih mampu menjadi pemasok kebutuhan masyarakat, dan mereka juga masih mampu memberikan lapangan kerja.

Perusahaan Kecil yang selama ini ternyata terbukti mempunyai daya tahan lebih baik menghadapi terpaan dan guncangan resis ekonomi dunia, perusahaan besar banyak yang tumbang atau paling tidak, wujud kerja mereka tidak seperti yang diharapkan, meskipun dengan mengatakan demikian tidak berarti bahwa peran perusahaan tidak diperlukan. Di samping itu, UMKM juga merupakan salah satu komponen utama pengembangan ekonomi lokal, di Indonesia, usaha mikro, usaha kecil dan menengah telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada perekonomian nasional. Usaha mikro bersama usaha kecil juga mampu bertahan menghadapi goncangan krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Indikatornya antara lain, serapan tenaga kerja antara kurun waktu sebelum krisis dan Ketika krisis berlangsung tidak banyak berubah, dan pengaruh negatif krisis terhadap pertumbuhan jumlah usaha mikro dan kecil lebih rendah dibanding pengaruhnya pada usaha menengah dan besar. Lebih jauh lagi, usaha mikro dan usaha kecil telah berperan sebagai

penyangga (buffer) dan katup pengaman (safety valve) dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menyediakan alternatif lapangan pekerjaan bagi para pekerja sektor formal yang terkena dampak krisis (Hastuti, 2003).

Kemiskinan telah dilakukan, tetapi hasil yang dicapai belum efisien. Berbagai forum dari tingkat lokal hingga internasional, menggelar diskusi tentang kemiskinan yang intinya hanya satu, yaitu bagaimana membebaskan manusia dari belenggu kemiskinan. Upaya mengentaskan kemiskinan ini dapat dilakukan antara lain dengan memutuskan mata rantai kemiskinan itu sendiri, di antaranya dengan penguatan berbagai aspek di sektor usaha kecil, dan menengah. UMKM yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat miskin, yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif. Selain itu, UMKM juga memiliki peran sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan PDB dan ekspor non migas, khususnya ekspor barang-barang manufaktur (Tambunan, 2003).

Peran UMKM terutama sejak krisis moneter tahun 1997 dapat dipandang sebagai media penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Selain sebagai salah satu alternative penyediaan lapangan kerja baru, UMKM berperan baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan sebagai program pengentasan kemiskinan maupun penyerapan tenaga kerja.

KAJIAN PUSTAKA

Kemiskinan

Secara umum kemiskinan lazim didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.

Definisi beranjak dari pendekatan berbasis hak yang menyatakan bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Secara umum kemiskinan lazim didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.

Definisi beranjak dari pendekatan berbasis hak yang menyatakan bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Penyebab Kemiskinan

Ada banyak penyebab kemiskinan. Sharp dalam Kuncoro (2004), mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Menurut Sharp, penyebab munculnya kemiskinan bisa dilihat dari sudut pandang Mikro. Secara Mikro ada tiga penyebab munculnya kemiskinan, antara lain ; (1) Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah, (2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan dan (3)

Penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty).

Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, ketertinggalan dan ketidaksempurnaan pasar. Logika berfikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse dalam Kuncoro (2006), yang mengatakan “a poor country is poor because it is poor” (suatu negara miskin menjadi miskin karena negara tersebut memang miskin).

Jenis-jenis kemiskinan

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut terjadi ketika seseorang atau kelompok tidak memiliki akses yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, pakaian, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Standar kemiskinan ini biasanya diukur dengan menggunakan garis kemiskinan global, seperti yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yaitu pendapatan di bawah \$2,15 per hari. Kemiskinan absolut sering ditemukan di negara berkembang atau daerah tertinggal yang memiliki tingkat pengangguran tinggi dan akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi. Untuk mengatasi kemiskinan ini, diperlukan kebijakan pemerintah yang fokus pada penyediaan kebutuhan dasar, akses pendidikan, serta peluang kerja yang layak.

2. Kemiskinan relatif

Merujuk pada kondisi di mana seseorang memiliki pendapatan lebih rendah dibandingkan rata-rata pendapatan masyarakat di sekitarnya, meskipun mereka masih bisa memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan ini bersifat relatif karena tergantung pada tingkat kesejahteraan dan standar hidup suatu negara atau wilayah. Misalnya, seseorang yang berpenghasilan rendah di negara maju mungkin masih memiliki akses ke makanan dan perumahan, tetapi mereka tetap dianggap miskin karena kesenjangan dengan kelompok masyarakat yang lebih sejahtera. Dampak dari kemiskinan relatif dapat mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan yang berkualitas, serta peluang sosial dan ekonomi yang lebih baik.

3. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural terjadi akibat adanya sistem atau kebijakan ekonomi dan sosial yang menghambat individu atau kelompok tertentu dalam mendapatkan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Contohnya adalah masyarakat di daerah terpencil yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas atau pekerjaan yang layak karena minimnya infrastruktur dan investasi. Selain itu, diskriminasi dalam hal gender, ras, atau status sosial juga dapat menjadi faktor yang memperparah kemiskinan struktural. Untuk mengatasi kemiskinan ini, diperlukan intervensi kebijakan yang mendorong pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja bagi semua kelompok masyarakat.

4. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural disebabkan oleh pola pikir, budaya, atau kebiasaan yang membuat seseorang atau kelompok sulit untuk keluar dari kondisi kemiskinan. Faktor-faktor seperti kurangnya motivasi untuk bekerja keras, rendahnya keinginan untuk menempuh pendidikan lebih tinggi, serta sikap pasrah terhadap kondisi ekonomi yang sulit dapat memperburuk kemiskinan ini. Misalnya, dalam beberapa komunitas, ada anggapan bahwa pendidikan tidak penting karena mereka lebih memilih bekerja sejak dini untuk membantu ekonomi keluarga. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan

masyarakat melalui pendidikan dan perubahan pola pikir sangat penting dalam mengatasi kemiskinan kultural.

Pengangguran

Menurut Sadono Sukirno (1994), pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Pengangguran adalah keadaan dimana orang ingin bekerja namun tidak mendapat pekerjaan. Di Indonesia angka pengangguran makin meningkat.

Jenis-jenis pengangguran

Jenis-jenis Pengangguran Pengangguran sering diartikan sebagai orang yang ingin bekerja namun tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran terdiri dari 3 macam

1. Pengangguran Terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara maksimal karena suatu alasan tertentu.
2. Setengah Menganggur adalah tenaga kerja yang kurang dari 35 jam perminggu.
3. Pengangguran Terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya manusia yang banyak, namun sumber daya manusia yang banyak tidak menjamin memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Salah satu faktor banyaknya pengangguran adalah sedikitnya angkatan kerja yang berkompoten. Budaya malas juga menjadi salah satu faktor makin meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia.

Penyebab Pengangguran

Pengangguran adalah suatu hal yang tidak dikehendaki, namun suatu penyakit yang terus menjalar di beberapa Negara, dikarenakan banyak faktor – faktor yang mempengaruhinya. Mengurangi jumlah angka pengangguran harus adanya kerjasama lembaga pendidikan masyarakat, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa faktor penyebab pengangguran

1. Sedikitnya lapangan pekerjaan yang enampung para pencari kerja. Banyaknya para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh Negara Indonesia
2. Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Banyak jumlah Sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab makin bertambahnya angka pengangguran di Indonesia.
3. Kurangnya informasi, dimana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari tau informasi tentang perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga pekerja.
4. Kurang meratanya lapangan pekerjaan, banyaknya lapangan pekerjaan di kota, dan sedikitnya perataan lapangan pekerjaan.
5. Masih belum maksimal nya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan softskill
6. Budaya malas yang masih menjangkit para pencari kerja yang membuat para pencari kerja mudah menyerah dalam mencari peluang kerja.

Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah

Definisi UMKM

UMKM merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyerap lebih dari 90% tenaga kerja dan menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dengan peranannya yang signifikan, UMKM menjadi instrumen penting dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Namun, meskipun memiliki potensi besar, UMKM masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan akses permodalan, kurangnya inovasi, serta rendahnya daya saing.

Oleh karena itu, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan UMKM guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini akan membahas peran UMKM dalam perekonomian, kebijakan yang telah diterapkan, serta tantangan yang dihadapi dan solusinya.

Peran UMKM

Peran UMKM juga berlaku pada peningkatan lapangan kerja bagi tenaga kerja produktif. UMKM telah mampu menyerap tenaga kerja sehingga berdampak pada distribusi pendapatan yang merata, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain sebagai peningkatan jumlah lapangan kerja dengan bermunculnya beberapa sektor usaha, ini akan menjadi peluang bagi para pemilik imajinasi dan kreativitas untuk berkarya serta membuka lapangan kerja sebagai wirausahawan. UMKM yang erat kaitannya dengan wirausaha menjadi peluang besar bagi seseorang untuk tidak termotivasi hanya menjadi pekerja namun membuka peluang usaha sendiri.

Kontribusi UMKM dalam pendapatan nasional disampaikan kementerian koperasi, usaha kecil, dan menengah (KUKM) tahun 2018 bahwa jumlah pelaku UMKM 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah total pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB 61,1% sisanya 38,9% disumbang oleh pelaku usaha besar yang sejumlah 5,550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. Kontribusi UMKM diatas didominasi oleh pelaku usaha mikro sejumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sumbangan usaha mikro terhadap PDB sebesar 37,8%. Data diatas menyatakan bahwa usaha mikro luas dengan cakupan serapan tenaga kerja yang besar. Usaha mikro memiliki bauran usaha yang luas dengan pondasi yang kuat menghadapi krisis ditambah perputaran transaksi yang cepat.

Peran penting dimiliki UMKM dalam memopang pertumbuhan ekonomi. Memiliki andil dalam penyerapan tenaga kerja serta menjadi sektor yang dapat mendistribusi hasil pembangunan. Sebagai sektor usaha yang diunggulkan Bank Indonesia serta kemampuannya mendorong pertumbuhan ekonomi, UMKM harus terus eksis serta didukung pemerintah dalam pertumbuhannya serta tertanamkannya masyarakat yang sadar UMKM melalui bantuan pendanaan, kemudahan pengurusan surat ijin usaha, banruan pendampingan, pelatihan yang bersifat membangun dan mendorong kemajuan UMKM kedepannya.

Kebijakan Pemerintah

Pemerintah menetapkan kebijakan untuk memperkuat peran UMKM dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui dukungan permodalan, peningkatan keterampilan, akses pasar, serta penyederhanaan regulasi. UMKM diberikan akses kredit bunga rendah, subsidi bunga, serta skema pembiayaan syariah guna mempercepat pertumbuhan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja, disediakan program pelatihan kewirausahaan, manajemen bisnis, dan pemasaran digital, serta insentif bagi UMKM yang menyelenggarakan magang dan pelatihan. Digitalisasi UMKM juga didorong melalui platform e-commerce, bantuan sertifikasi, serta kemitraan dengan perusahaan besar guna memperluas akses pasar. Regulasi dipermudah dengan perizinan digital dan insentif pajak bagi UMKM yang menyerap tenaga kerja. Selain itu, pekerja UMKM mendapatkan perlindungan BPJS dengan skema iuran terjangkau serta bantuan sosial berbasis produktivitas.

Untuk memastikan efektivitas kebijakan, pemerintah membentuk satuan tugas khusus dan memperkuat sinergi antarinstansi. Dengan langkah ini, UMKM diharapkan menjadi motor utama dalam pengurangan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan metode **literatur review** untuk menganalisis pengaruh peran UMKM dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Data diperoleh melalui telaah terhadap berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan yang membahas peran UMKM dalam perekonomian, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Literatur yang dikaji mencakup teori tentang UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal, kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM, serta studi empiris yang membahas dampak UMKM terhadap pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Analisis dilakukan dengan metode **analisis isi**, di mana data dari berbagai literatur dikategorikan berdasarkan tema-tema utama, kemudian disintesis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan yang diterapkan dan dampaknya terhadap masyarakat.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil tinjauan literatur, penelitian ini menemukan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat signifikan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui berbagai mekanisme, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan ekonomi berbasis komunitas. UMKM menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama bagi kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang terbatas, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di berbagai daerah. Studi yang dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM yang sehat berkorelasi positif dengan penurunan tingkat kemiskinan, karena usaha kecil dan menengah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berwirausaha atau mendapatkan pekerjaan dengan modal dan keterampilan yang relatif lebih rendah dibandingkan sektor formal.

Selain itu, berbagai kebijakan pemerintah telah diterapkan untuk mendukung peran UMKM dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Program-program seperti bantuan permodalan, subsidi bunga kredit, pelatihan keterampilan usaha, serta penyederhanaan regulasi perizinan telah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan UMKM. Misalnya, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memberikan akses permodalan dengan bunga rendah telah membantu banyak pelaku usaha kecil dalam mengembangkan bisnis mereka. Selain itu, kebijakan yang mendukung digitalisasi UMKM, seperti pelatihan e-commerce dan akses ke pasar digital, juga berperan dalam meningkatkan daya saing UMKM di era globalisasi. Beberapa studi menyebutkan bahwa UMKM yang berhasil mengadopsi teknologi digital cenderung mengalami peningkatan omset dan ekspansi usaha yang lebih cepat dibandingkan UMKM konvensional.

Namun, meskipun memiliki peran yang penting, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat kontribusi maksimalnya terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Keterbatasan akses terhadap teknologi, kurangnya keterampilan manajerial, rendahnya literasi keuangan, serta minimnya inovasi dalam pengelolaan usaha menjadi hambatan utama bagi banyak UMKM untuk berkembang lebih lanjut. Selain itu, persaingan dengan perusahaan besar dan produk impor sering kali menjadi kendala bagi UMKM dalam mempertahankan pasar mereka. Studi lain juga menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan UMKM masih rendah, dengan banyak usaha kecil yang mengalami kegagalan dalam lima tahun pertama operasinya akibat faktor seperti kurangnya modal kerja, lemahnya strategi pemasaran, dan kurangnya adaptasi terhadap perubahan pasar.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem bisnis yang lebih

kondusif bagi UMKM. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor perbankan dalam menyediakan akses keuangan yang lebih fleksibel, peningkatan pelatihan kewirausahaan berbasis digital, serta fasilitasi akses pasar melalui platform e-commerce menjadi strategi yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat peran UMKM dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif untuk memberdayakan UMKM di daerah terpencil atau pedesaan, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat lebih merata. Dengan adanya dukungan yang berkelanjutan dan kebijakan yang tepat sasaran, UMKM dapat menjadi motor utama dalam membangun perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta menjadi solusi efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang signifikan dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. UMKM menjadi salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, khususnya bagi masyarakat dengan keterampilan dan pendidikan terbatas. Dengan adanya UMKM, masyarakat memiliki peluang untuk berwirausaha atau mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan UMKM, seperti program bantuan permodalan, subsidi bunga kredit, pelatihan keterampilan usaha, serta digitalisasi UMKM. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan insentif pajak telah memberikan dampak positif bagi perkembangan UMKM. Selain itu, digitalisasi UMKM semakin membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk bersaing di era globalisasi.

Namun, meskipun memiliki potensi besar, UMKM masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses terhadap teknologi, rendahnya keterampilan manajerial, kurangnya literasi keuangan, serta persaingan ketat dengan perusahaan besar dan produk impor. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendukung perkembangan UMKM agar semakin berdaya saing dan mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian.

SARAN

Untuk mendukung pertumbuhan UMKM dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, seperti meningkatkan akses permodalan dengan bunga rendah, memberikan pelatihan keterampilan bisnis dan pemasaran digital, serta mendorong inovasi produk agar lebih kompetitif. Selain itu, digitalisasi UMKM perlu dipercepat dengan dukungan infrastruktur dan pendampingan e-commerce agar mereka dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Pemerataan peluang usaha di daerah terpencil juga harus diperhatikan melalui pembangunan infrastruktur dan insentif bagi pelaku usaha lokal. Sinergi yang kuat antara semua pihak akan menciptakan ekosistem usaha yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan, sehingga UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiny, P., & Nurjannah, N. (2018). Analisis pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di kota langsa. *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 31-37.
- Annisa, A. (2022). Dampak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Sibolga. *Jurnal Economica Didactica*, 3(1), 46-59.
- Indika, M., & Marliza, Y. (2019). Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. *Journal Management, Business, and Accounting*, 18(3), 49-66.
- Mutmainnah, I., & Utomo, J. (2024). Peranan UMKM dalam Upaya Pengurangan Angka Pengangguran sebagai Langkah Awal Pembangunan Perekonomian. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 1(1), 46-52.
- Nasrun, A. P., Nujum, S., & Sufri, M. (2022). Pengaruh Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Mengatasi Kemiskinan Dan Pengangguran Di Kota Makassar. *Tata Kelola*, 9(1), 78-87.